

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KELAYAKAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Syamsuddin*)

Dosen STIE Ichsan Pohuwato Gorontalo

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari Sistem pencatatan dan Basis akuntansi terhadap Kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Pohuwato. (2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem pencatatan terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Pohuwato secara parsial. (3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Basis akuntansi terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Pohuwato.

Hasil ini dari penelitian menunjukkan bahwa sub variabel sistem pencatatan merupakan penentu dominan atas kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, yang berarti bahwa sistem pencatatan yang lebih baik adalah pencatatan yang mengacu pada persamaan dasar akuntansi, maka kelayakan pelaporan Keuangan pertanggungjawaban semakin lebih layak. Selain itu juga dipengaruhi transaksi-transaksi yang terjadi pada umumnya selalu dilakukan pencatatan, penggolongan dan peringkasan basis akuntansi (X2) secara parsial atau individu berpengaruh positif terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,0485 atau 4,85%. Ini diakibatkan karena dalam basis akuntansi diterapkan dua sistem yaitu kas basis dan accrual basis, sehingga pembuat laporan keuangan terkadang tidak konsisten dalam penerapan dari kedua sistem tersebut. Dengan demikian untuk menghasilkan kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik perlu dilakukan penyempurnaan pada sub variabel basis akuntansi.

Kata kunci: *Kompetensi, motivasi, lingkungan kerja, kinerja*

Abstract

The purpose of this study is (1) to measure the influences of application the Regional Financial Accounting System which consists of a recording system and an accounting basis for the feasibility of reporting financial accountability at the Pohuwato Regional Civil Service Agency. (2) To discover influence effect of applying the recording system to the feasibility of financial accountability reporting at the Pohuwato Regional Civil Service Agency partially. (3) To find out influence effects of application accounting bases on the feasibility of reporting financial accountability at the Pohuwato Regional Civil Service Agency.

The results of this study indicate that the recording system sub-variable is the dominant determinant of the feasibility of reporting financial accountability, which imply that a preferable recording system is refers to the basic accounting equation, the financial reporting feasibility of accountability is more appropriate. Furthermore, it is also influenced by transactions that occur in general, always recording, classifying and summarizing. Partial or individual (X2) accounting basis have a positive effect on the feasibility of reporting financial liability of 0.0485 or 4.85%. This is due to the fact that in the basis of accounting applied two systems, namely cash basis and accrual basis, therefore that financial report makers are occasionally inconsistent in the application of the two systems. Thus to produce the feasibility of reporting financial accountability more properly, it needs to be done perfection in the accounting base sub-variable.

Keywords: *Competence, motivation, work environment, performance*

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan daerah

merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat

perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat peran akuntansi sangat dibutuhkan, tidak (saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, salah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan daerah.

Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mencuat karena lemahnya akuntabilitas. Banyak demonstran yang menuntut akuntabilitas keuangan diberbagai negara. Sebagai contoh kasus jatuhnya pemimpin pemerintahan, seperti di negara republik Indonesia lebih disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas keuangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, Indonesia masih tergolong dalam sepuluh negara yang terkonip terbesar. (Bahtiar Arif,dkk. 2002 : 3)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi keuangan daerah, rancangan APBN tahun 2002 diperkirakan sekitar Rp. 250 triliun lebih atau sekitar 750% dari APBN tahun 1969. Nilai RAPBN 2002 juga merupakan seperlima dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik.

Perkembangan saat ini menyebabkan peran masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat semakin besar. Dengan adanya tuntutan transparansi sebagai hasil reformasi tahun 1998, pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara

yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat (*disclaimer*) atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) tahun anggaran 1999/2000 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-R1) merupakan "angka merah" dalam rapor pemerintah.

Dalam konteks akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas dan neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan, jika ditinjau dari sisi internalnya maka laporan tersebut merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah, tetapi jika ditinjau dari eksternalnya laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Jika dilihat dari perspektif historis, usaha pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah telah dirintis sejak dua puluh tahun silam, akan tetapi sampai saat

ini sistem yang ada belum berjalan secara efektif dan efisien.

Badan Kepegawaian Daerah pohuwato, merupakan salah satu organisasi yang bernaung di jajaran pemerintahan daerah, setiap tahunnya membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pohuwato tetap mengacu pada sistem akuntansi keuangan daerah, hal ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Jika sistem akuntansi lemah maka menyebabkan pengendalian intern yang lemah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: " Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato".

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, social dan politik. Pada dasarnya, akuntansi pada sektor swasta maupun sector publik, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan

memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan. (Mardiasmo, 2004: 147)

Menurut *Accounting Principle Board (APB)* yang dikutip oleh AbedHalim (2001: 164) yang memandang akuntansi dan sudut fungsinya adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Lebih lanjut menurut Suwardjono, yang dikutip oleh Ihyaul Ulum (2005 : 2), Akuntansi adalah " seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah di dalam Akuntansi

Sogiyanto, dkk. (1995) dalam Abdul Halim (2002 : 30), mengemukakan bahwa akuntansi terdiri tiga bidang utama yaitu akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan dan akuntansi sosial. Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional, misalnya neraca pembayaran negara, rekening arus dana,

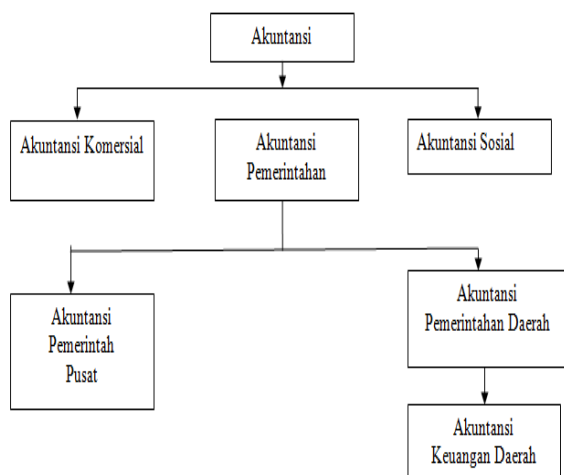
rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintah sama dengan transaksi perusahaan terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi pemerintahan memiliki karakter khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis, akuntansi pemerintahan tergolong akuntansi mikro.

Lingkungan akuntansi pemerintahan adalah :

1. Akuntansi pemerintah pusat.
2. Akuntansi pemerintah daerah, yang terdiri dari :
 - a. Akuntansi Pemerintahan Propinsi
 - b. Akuntansi Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi dapat digambarkan seperti pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kedudukan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi sektor publik. Tujuan dari akuntansi sektor publik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (akuntabilitas).
Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
- b. Manajerial
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi keuangan sektor publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
- c. Pengawasan
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi sektor publik harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ketiga tujuan di atas akan lebih mampu dipenuhi oleh akuntansi daripada oleh tata buku, karena :

- a. Akuntansi menghasilkan lebih banyak informasi dibandingkan tata buku, berupa laporan keuangan yang meliputi laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBDD, laporan perhitungan ekuitas dana, laporan aliran kas, dan neraca. Hal ini menyebabkan tujuan pertanggungjawaban makin terpenuhi melalui neraca dan tujuan manajerial makin terpenuhi melalui laporan surplus/defisit anggaran.
- b. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih baik dibandingkan tatabuku, sehingga dan segi pengawasan internal (oleh pihak pemerintah daerah sendiri) dan

eksternal (oleh BPK, rakyat, Pemerintah Pusat, DPRD, analias keuangan, investor, kreditor, donatur, dan lain-lain sesuai dengan jiwa PP nomor 105/200 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Kemudiaan menurut *American Accounting Association* (1970) dalam Gynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah penggunaan dana publik.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2002 : 35), Akuntansi keuangan daerah adalah suatu identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dan suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan suatu informasi dalam rangka suatu keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBN yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di daerah. Berikut ini sistem Akuntansi keuangan daerah sebagai berikut :

1. Sistem Pencatatan (Tata Buku Berpasangan)

Sistem pencatatan yang pada Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem tata buku berpasangan (*double entry bookeping*). Sistem ini digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem tata buku tunggal. Dengan tata buku berpasangan antara lain akan lebih mudah menyusun laporan dan menentukan selisih pembukuan yang terjadi. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sebagai berikut:

$\text{AKTIVA} + \text{BELANJA} =$ $\text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA} +$ PENDAPATAN

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debet sedangkan yang berakibat kurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal sama dengan pos Belanja.

Hal sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan

pendapatan. Apabila transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal demikian juga pada pos ekuitas dana dan pendapatan.

2. Basis Akuntansi

Setelah memahami sistem, hal yang sangat penting juga adalah pengakuan. Pengakuan menurut IAS Framework, dalam Abdul Halim (2004 : 38), adalah proses memasukkan ke neraca atau laporan laba rugi (dalam konteks akuntansi sektor disebut laporan surplus defisit).

Kemudian menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf dalam neraca atau laporan laba rugi. Kriteria pengakuan tersebut ada 2 yaitu :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari entitas.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dasar akuntansi yang digunakan pada akuntansi sektor publik adalah :

1. Basis Kas

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan /pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada kas diterima di

rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas dan belanja diakui saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/ entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

2. Basis Akrua

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode yang terjadi.

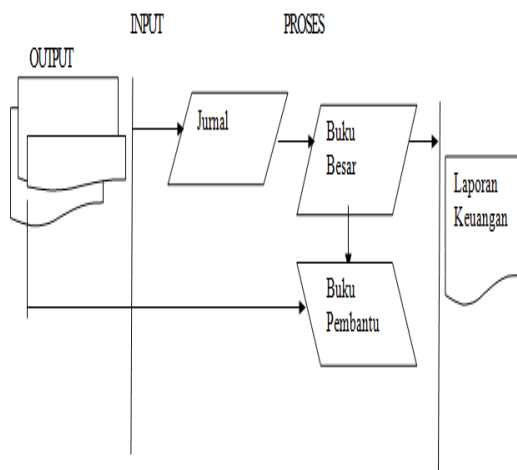
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mohammad Mahsun, dkk (2006 : 93), siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan. Siklus ini dimulai dari transaksi yang harus didukung dengan bukti dan dicatat di Buku Jurnal. Selanjutnya dari buku jurnal, diposting ke buku besar dan buku besar pembantu. Dengan klasifikasi di daftar saldo, kertas kerja serta penyesuaian maka dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Setelah tahap penutupan dan dibuat daftar saldo setelah penutupan sertapembalikan, maka neraca awal dapat disusun dengan baik.

Untuk lebih jelasnya proses akuntansi yang diterima secara umum

dapat ke dalam siklus akuntansi sebagai berikut :



Gambar 2. Siklus Akuntansi

Dari gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi adalah:

- a. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
- b. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
- c. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah di jurnal. ini disebut *posting*.
- d. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
- e. Menyesuaikan buku besar berdasarkan informasi yang paling *up-to-date*.
- f. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.

- g. Menyusun Laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP)
- h. Menentukan buku besar.
- i. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Tutup Buku.

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan tujuan tertentu. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Didalam proses terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan tersebut adalah jurnal, buku dan buku pembantu (BP).

Dalam konteks akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Perlunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat pemerintah daerah harus telah sistem akuntansi yang handal. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian interen yang lemah dan pada akhirnya laporan keuangan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dapat kurang relevan untuk pengambilan keputusan.

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan pemerintah secara luas Standar Akuntansi Sektor Publik.

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan pun keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang datang. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.
- b. Badan Pengawas Keuangan
Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atau pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah : Inspektorat Jenderal, dan Badan Pemeriksa Keuangan
- c. Investor, Kreditur, dan Donatur
Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah.
- d. Analisis ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah.
Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.
- e. Rakyat
Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintahan

khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

- f. Pemerintah Pusat.
Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP Nomor 108/2000)
- g. Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten, atau Kota).
Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal pinjaman.

Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca
Adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Arus kas
Adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pusat/daerah selama periode tertentu
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
Adalah meliputi catatan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam realisasi

anggaran, Neraca, dan laporan arus kas.

Menurut Rasul (2008 : 8) Akuntabilitas dapat didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dari pengertian akuntabilitas diatas dapat memberikan suatu kerangka pertanggungjawaban dari seseorang atau kelompok orang yang memberikan amanat untuk melaksanakan tugas tertentu kepada pihak yang memberikan amanat.

Laporan keuangan yang dihasilkan guna pertanggungjawaban keberbagai pihak yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan, sehingga diperlukan kriteria kualitas laporan keuangan berdasarkan ukuran-ukuran normatif, sebagai berikut :

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalam dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu. Dengan demikian informasi yang relevan harus memiliki

1. Memiliki umpan balik (*feedback value*)

Informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian dimasa kini.

3. Tepat waktu

Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh

dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, yaitu cakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan.

b. Andal

Informasi keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi, add (tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu). Informasi yang andal harus karakteristik :

1. Penyajian jujur.

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dan sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralisasi

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara pihak lain akan dirugikan.

c. Dapat Dibandingkan (*Comparable*)

Suatu informasi keuangan yang dapat diperbandingkan akan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, karena setiap perubahan variabel-variabelnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan analisis yang akurat. Perbandingan

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

METODE PENELITIAN

Operasional Variabel Penelitian

Untuk mengetahui data data yang maka dahulu perlu mengoperasionalkan variabel-variabel seperti yang telah diinvestarisir yang telah dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator variable yang bersangkutan sekaligus menentukan instrument atau pengukuran variable yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator-Indikator	Skala
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)	Sistem Pencatatan (X1)	a. Pencatatan Transaksi b. Pendebetan Suatu Rekening c. Pengkreditan suatu Rekening d. Keseimbangan pencatatan e. Penggolongan Transaksi f. Peingkasan g. Penyajian laporan keuangan h. Mengacu pada persamaan dasar akuntansi	Ordinal (Kuisioner)
	Basis Akuntansi (X2)	a. Pencatan uang b. Pencatatan perubahan Aset c. Transaksi hutang d. Perubahan ekuitas dana	Ordinal (Kuisioner)
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (Y)	1. Relevan	a. Memberikan manfaat b. Memiliki umpan balik c. Tepat waktu d. Lengkap	Ordinal (Kuisioner)
	2. Andal	a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas d. Bebas dari pengentian penyertakan	Ordinal (Kuisioner)
	3. Dapat Dibandingkan	a. Bermanfaat bagi pengambilan keputusan b. Perbandingan secara internal c. Perbandingan secara eksternal d. Pengungkapan perubahan	Ordinal (Kuisioner)
	4. Dapat Dipahami	a. Informasi harus dipahami oleh pengguna b. Kemauan pengguna untuk mempelajari c. Pengguna memiliki pengetahuan yang memadai d. Lapoan yang dihasilkan mudah dipahami	Ordinal (Kuisioner)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert. Kuisisioner disusun dengan menyiapkan (Lima) pilihan yakni selalu, sering, kurang/kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Selalu	5
Sering	4
Kadang-Kadang	3
Jarang	2
Tidak Pernah	1

Populasi

Menurut Husaini Putnonio (2003:42) Menyatakan bahwa populasi adalah semua nilai baik perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung, ataupun kuantitatif daripada karakteristik tertentu tentang sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, Sudjana (2001:5). Sedangkan menurut Nasir, dikutip Teguh (2000 : 125) Populasi adalah kumpulan dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang dibagikan kepada Pegawai Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa informasi-informasi tertulis yang berhubungan penelitian ini, yang mendukung data primer seperti Laporan keuangan.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung atau Pada objek yang diteliti dalam hal ini Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Laporan Keuangan

2. Wawancara

Adalah salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara atau interview oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan informasi dimana yang menjadi sasaran interview adalah para pimpinan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato.

3. Dokumentasi

Penulis akan melakukan pengamatan pada dokumen-dokumen maupun kearsipan yang menyangkut Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato

4. Kuesioner

Adalah daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada para pimpinan dan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato.

Uji validitas

Menurut Arikunto (2001 : 219) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahian suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur.

Menurut Sugiyono (1999:109) instrumen yang valid berarti alat ukur yang untuk

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji Validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan terhadap koefisien korelasi.

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan rumus korelasi seperti yang oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi product moment berikut :

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY - (\sum X)(\sum Y))}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

dimana:

- r : Angka korelasi
- X : Skor Pertanyaan (ke-n) variabel x
- Y : Skor Pertanyaan (ke-n) variabel Y
- n : Jumlah responden
- XY : Skor pertanyaan dikali total pertanyaan

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

$$t_{\text{Hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana:

- t : Nilai Hitung
- r : Koefisien korelasi hasil r hitung
- n : Jumlah responden

Ditribusi (tabel t) untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat kebebasan (dk n-2), kaidah

jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ berarti valid, sebaliknya jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti tidak valid.

Menurut Masrun, yang dikutip Sugiyono (1999:106) menyatakan item yang korelasi positif dengan kriterium (skor total) dan korelasinya tinggi, bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Jika instrumen itu valid, maka dapat dilihat kriteria penafsiran mengenai korelasinya (r) sebagai berikut :

Tabel 3. Indeks Korelasi

r	Keterangan
0,800 - 1,000	Sangat Tinggi
0,600 - 0,799	Tinggi
0,400 - 0,599	Cukup Tinggi
0,200 - 0,399	Rendah
0,000 - 0,199	Sangat Rendah

Sumber : Richuan (2004:110)

Uji Reliabilitas

Instrumen reliabel akan mendapatkan hasil serupa berupa data yang dapat dipercaya juga. Jadi kunci dari reliabilitas adalah tersedianya data yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alat ukur dengan cara memberikan skor yang relatif sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Jika keandalan suatu alat ukur yang berkaitan dengan kekonsistenan hasil (skor) pengukurannya.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu,

walaupun dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan kembali terhadap gejala yang sama.

Menurut Sugiyono (1999:110), menyatakan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Koefisien korelasi antara dua kelompok tersebut menunjukkan keandalan internal alat ukur yang digunakan. Proses perhitungannya dilakukan dengan Program Excel 2007. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan tingkat keandalan kuisisioner adalah komparasi internal dalam bentuk belah dua (ganjil genap). Skor item yang diperoleh dikelompokkan dalam dua bagian skor kelompok item yang bernomor ganjil dan kelompok item yang bernomor genap

Uji ini dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua dari Spearman Brown (*Split-half*), yang langkah-langkah kerjanya sebagai berikut:

1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
3. Mengkorelasikan skor total belah pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.
4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang (*split-half*), maka angka korelasi yang lebih rendah dan pada angka yang jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

Menurut Sugiyono (1999 :278) dicari angka reliabilitasnya untuk keseluruhan item dengan rumus Spearman Brown, sebagai berikut :

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

Dimana :

r_i = reliabilitas internal selitruh instrumen atau petnyaitan

r_b = korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan 'hitung > tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliable / handal.

Dan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kelayakan Pelaporan pertanggungjawaban Keuangan menggunakan Regresi berganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Dimana :

Y = Kelayakan Laporan
Pertanggung Jawaban
Keuangan

a = Konstanta

b_1, b_2 , = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem Pencatatan

X_2 = Dasar Akuntansi

Hasil Penelitian

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuisioner atau pertanyaan yang disiapkan dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara masing-masing item pertanyaan. Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus Rank Spearman.

Uji validitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Masing-Masing Sub Variabel

Sub. Variabel	Jumlah Item	Tingkat Validitas	No. Lampiran Hasil Uji Validitas
Sistem Pencatatan (X1)	8	Valid	Lampiran 2
Basis Akuntansi (X2)	4	Valid	Lampiran 2
Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan (Y)	16	Valid	Lampiran 2

Berdasarkan hasil pengujian validitas dari keseluruhan item yang ada maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua (Split Half Methode). Teknik ini digunakan dengan cara membelah dua masing-masing pertanyaan ganjil dan pertanyaan genap yang kemudian masing-masing belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing item pertanyaan. Untuk total skor belahan

pertama dan skor total belahan kedua dikorelasikan dengan menggunakan korelasi Rank Spearman, yang kemudian angka tersebut disesuaikan dengan mendapat angka reliabilitas secara menyeluruh.

Pengujian Hipotesis Pertama Dan Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama adalah penerapan sistem akuntansi keuangan cialrah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato

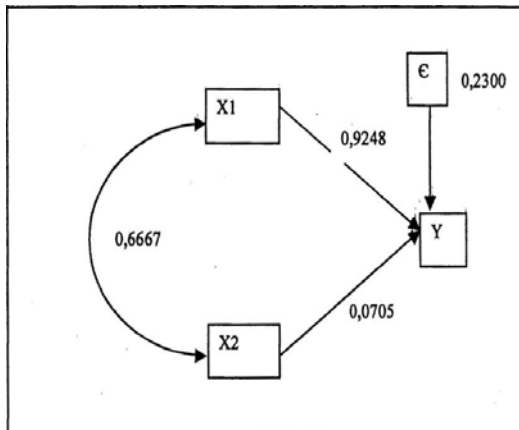
Koefisien jalur sub variabel sistem pencatatan terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan (P_{YX1}) sebesar 0,9248 atau 92,48%. Koefisien jalur sub variabel basis akuntansi terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan (P_{YX2}) sebesar 0,0705 (7,05%). Koefisien jalur variabel luar yang tidak diteliti (P_{Ye}) sebesar 0,2300 (23%). Pengaruh secara simultan variabel X terhadap Y sebesar 0,9471 atau 94,71% dan pengaruh variabel luar yang tidak diteliti sebesar 0,0529 atau 5,29%.

Dan interpretasi tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Koefisien Jalur X1 terhadap Y	P_{YX1}	0,9248
Koefisien Jalur X2 terhadap Y	P_{YX2}	0,0705
Koefisien Determinasi Multiple	$R^2_{Y, X1, X2}$	0,9471
Koefisien Determinasi Variabel Luar Terhadap Y	P_{Ye}	0,0529
Koefisien Jalur Variabel Luar Terhadap Y	P_{Ye}	0,2300

Dari tabel diatas dapat digambarkan koefisien jalur besamya pengaruh sub-sub variabel X terhadap Y secara simultan dalam analisis jalur sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur Analisis Jalur Variabel X1 dan X2 berpengaruh Terhadap Y

Pengaruh sub-sub variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari: Sistem Pencatatan (X1), dan Basis Akuntansi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan (Y) nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Struktur Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X1 dan X2

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh
		X1	X2	
X1	0,8552		0,0435	0,8987
X2	0,0050	0,0435		0,0485
Total Pengaruh Variabel X1 — X2				0,9471
Total Pengaruh Variabel luar terhadap Y				0,0529
total Pengaruh				1,0000

Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dari Sistem pencatatan dan Basis akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan sebesar 0,947 atau 94,7% dan variabel luar yang tidak diteliti sebesar 0,0529 atau 5,29%.

Pengujian Hipotesis kedua

Rumusan Hipotesis kedua adalah Sistem Pencatatan berpengaruh terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan, metode yang digunakan dalam melakukan pengujian secara individu menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan total pengaruh variabel Struktur Sistem Pencatatan (X1) terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Struktur Pengaruh langsung dan tidak langsung Sistem Pencatatan

Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh
	X1	X2	
0,8552		0,0435	0,8987

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung sistem pencatatan terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan sebesar 0,8552 atau 85,52%, dan pengaruh tidak langsung adalah sub variabel sistem pencatatan (X1) melalui basis akuntansi (X2) sebesar 0,0435 (4,35%). Total Pengaruh sistem pencatatan terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,8987 atau 89,87%.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena sub variabel basis akuntansi berpengaruh terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato

Pengujian Hipotesis Ketiga

Rumusan Hipotesis ketiga adalah basis akuntansi berpengaruh terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, metode yang digunakan dalam melakukan pengujian secara individu menggunakan analisis jalur (Path Analysis) . Besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan total pengaruh variabel basis akuntansi (X2) terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Struktur Pengaruh Lansung dan Tidak Lansung Basis Akuntansi

Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh
	X1	X2	
0,0050	0,0435		0,0485

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung basis akuntansi terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,0050 (0,5%), dan pengaruh tidak langsung adalah variabel basis akuntansi (X2) melalui sistem pencatatan (X I) sebesar 0,0435 (4,35%). Total pengaruh basis akuntansi terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,0485 (4,85%). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena sub variabel basis akuntansi berpengaruh terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam pembahasan ini akan diuraikan seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari sistem pencatatan dan basis akuntansi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato. Besarnya Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kelayakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato adalah 0,947 atau (94,7%) yang terdiri dari sistem pencatatan (X1) sebesar 0,8987 atau (89,87%) dan basis akuntansi (X2) sebesar 0,0485 atau (4,85%), sedangkan variabel lain yang tidak diteliti sebesar 0,0529 atau (5,29%).

Diantara ke dua sub variabel tersebut diatas secara parsial pengaruh sub variabel sistem pencatatan terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan lebih besar dibandingkan dengan sub variabel basis akuntansi. Hasil ini disebabkan karena pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato setiap kejadian transaksi yang terjadi sering dilakukan pencatatan, kemudian pencatatan transaksi tersebut tetap mengacu pada persamaan dasar akuntansi. Oleh karena itu untuk kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara optimal sangat ditentukan oleh sistem pencatatan.

Pembahasan Hipotesis Kedua

Hasil penelitian menggambarkan temuan mengenai variabel sistem pencatatan terhadap pelaporan keuangan secara parsial memiliki

pengaruh sebesar 89,87% (pengaruh langsung sebesar 85,52% dan total pengaruh tidak langsung sebesar 4,35%). Hasil ini menunjukkan bahwa sub variabel sistem pencatatan merupakan penentu dominan atas kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, yang berarti bahwa sistem pencatatan yang lebih baik adalah pencatatan yang mengacu pada persamaan dasar akuntansi, maka kelayakan pelaporan keuangan pertanggungjawaban semakin lebih layak. Selain itu juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi yang terjadi pada umumnya selalu dilakukan pencatatan, penggolongan dan peringkasan.

Dengan demikian, sub variabel sistem pencatatan paling berpotensi dalam menghasilkan kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan kabupaten Pohuwato

Pembahasan Hipotesis Ketiga

Hasil penelitian menggambarkan temuan mengenai sub variabel basis akuntansi terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara parsial memiliki pengaruh sebesar 4,85% (pengaruh langsung sebesar 0,5% dan total pengaruh tidak langsung sebesar 4,35%). Hasil ini menunjukkan bahwa sub variabel basis akuntansi bukan merupakan penentu dominan dalam menghasilkan kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, walaupun sub variabel pengakuan basis akuntansi yang lebih baik membawa konsekuensi kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih layak pula, ini diakibatkan karena dalam basis akuntansi diterapkan dua sistem yaitu kas basis dan accrual basis, sehingga pembuat laporan keuangan terkadang tidak konsisten dalam penerapan dan kedua sistem tersebut. Dengan demikian maka untuk menghasilkan kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik perlu dilakukan

penyempumaan pada sub variabel basis akuntansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang dilakukan, sehingga penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sistem pencatatan, dan basis akuntansi secara simultan berpengaruh positif terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,9471 atau (94,7%), diantara ke dua sub variabel tersebut diatas secara parsial pengaruh sub variabel sistem pencatatan terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan lebih besar dibandingkan dengan sub variabel basis akuntansi. Hasil ini disebabkan karena pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pohuwato, setiap kejadian transaksi yang terjadi sering dilakukan pencatatan, kemudian pencatatan transaksi tersebut tetap mengacu pada persamaan dasar akuntansi. Oleh karena itu untuk kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara optimal sangat ditentukan oleh sistem pencatatan. sedangkan sebesar 0,0529 (5,3%) adalah variabel luar yang tidak diteliti seperti sistem desentralisasi pelaksanaan akuntansi, prinsip dan standar akuntansi pemerintah
2. Sistem pencatatan (X1) secara parsial atau individu berpengaruh positif terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,8987 atau 89,87%. Hasil ini menunjukkan bahwa sub variabel sistem pencatatan merupakan penentu dominan atas kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, yang berarti bahwa sistem pencatatan yang lebih baik adalah pencatatan yang mengacu

pada persamaan dasar akuntansi, maka kelayakan pelaporan Keuangan pertanggungjawaban semakin lebih layak. Selain itu juga dipengaruhi transaksi-transaksi yang terjadi pada umumnya selalu dilakukan pencatatan, penggolongan dan peringkasan.

3. Basis akuntansi (X2) seam parsial atau individu bapengaruh positif tabadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebesar 0,0485 atau 4,85%. Ini diakibatkan karena dalam basis akuntansi diterapkan dua sistem yaitu kas basis dan accrual basis, sehingga pembuat laporan keuangan terkadang tidak konsisten dalam penerapan dari kedua sistem tersebut. Dengan demikian untuk menghasilkan kelayakan pelaporan patanggungjawaban keuangan yang lebih baik perlu dilakukan payempumaan pada sub variabel basis akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Arit Muchlis, Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik Penerbit Andi Yogyakarta.
- Ihyaul Ulum MD, 2005. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdul Halim, 2001. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Moh. Mahsun, dkk, 2005. Akuntansi Sektor Publik Penerbit BPFE Fak. Ekonomi UGM Yogyakarta.
- Rasul Sjahruddin, 2003, Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam per. UU No. 17 /2003 Tentang Keuangan Negara, Penim Percetakan Negara Jakarta.
- Husain Pumotno, 2003. Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis, Cetakan Kelima, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudjana, 2001. Metode Statistika, Edisi revisi, cetakan keenam, Penerbit Tarsito Bandung.
- Teguh Muhammad, 2000. Metodologi Penelitian Ekonomi, Penerbit Rajawali Persada, Bandung.
- Arikunto, 2001. Metodologi Penelitian, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono, 1999,. Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Riduwan, 2004. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Penerbit Alfabeta Bandung.